

Daftar Pustaka

- Azizah, S., 2017. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 3(2), pp.49-60.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Karimun Dalam Angka Karimun Regency in Figures. Kabupaten Karimun.
- Basirun, N., 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran.
- Basirun N., 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031.
- dan Perikanan, K.K., 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMENKP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- Dasminto. 2007. Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Kawasan Pengembangan Industri Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Djakapermana, R.D., Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang. *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*.
- Huda, M.C., 2013. Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. *Perspektif*, 18(2), pp.126-135.
- Husin, S., 2016. Reclamation in the View of the Protection of Marine Environment under the Environmental Law and the Law concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. *Indonesian J. Int'l L.*, 14, p.294.

- Ipsi, S., Alatas, R.R., 2017. Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Mariso Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kalalo, F.P., 2009. Kebijakan reklamasi pantai dan laut: implikasi terhadap hak masyarakat pesisir dan upaya perlindungannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(1), pp.102-118.
- Kirmanto, D., 2007. Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007): Direktorat Jenderal Penataan Ruang. *Departemen Pekerjaan Umum*.
- Loures, L. and Panagopoulos, T., 2007. Sustainable reclamation of industrial areas in urban landscapes. *Sustainable Development and Planning Iii, Vols 1 and 2, 102*, pp.791-800.
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2016. Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir : Tujuan, Manfaat dan Efek.
- Nadzir, N.M., Ibrahim, M. and Mansor, M., 2014. Impacts of coastal reclamation to the quality of life: Tanjung Tokong community, Penang. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 153, pp.159-168.
- Nawawi, I., 2014. *Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat: Studi di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Pawitro, U., 2015. Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: antara Pelestarian Lingkungan dan Ekonomi Kawasan. *Temu Ilmiah IPLBI*.

- Rafiq A., 2017. Provinsi Kepulauan Riau Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.
- Suryani, A.E., 2010. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Maimoon Kota Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sutardjo S.C., 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Sutardjo S.C., 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Terapan, M., 2007. Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 44/PRT/M/2007): Direktorat Jenderal Penataan Ruang. *Departemen Pekerjaan Umum*.
- Wahyuni, F., 2017. Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung (Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus Reklamasi Pantai Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung).
- Wang, W., Liu, H., Li, Y. and Su, J., 2014. Development and management of land reclamation in China. *Ocean & Coastal Management*, 102, pp.415-425.
- Wardani, Khusnul. 2013. *Pengendalian Konstruksi Reklamasi*. Makalah.

Yudhoyono, S.B., 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang.

Yudhoyono, S.B., 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Yudhoyono, S.B., 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012
Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.